

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Pada bagian ini peneliti memaparkan fokus dari penelitian ini yaitu inovasi kebijakan retribusi pelayanan parkir berupa karcis parkir hologram berhadiah. Dimana penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif

1. Realisasi Inovasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Munculnya inovasi karcis parkir hologram berhadiah Dinas Perhubungan Kota Surabaya tidak lepas dari keinginan Dishub untuk melakukan pembaharuan ide-ide dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat pada bidang perparkiran serta mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas yang lebih baik untuk masyarakat Kota Surabaya. Salah satunya yakni inovasi terbaru Dishub berupa karcis parkir hologram berhadiah, hal ini tidak lepas dari evaluasi inovasi sebelumnya. berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tranggono Wahyu selaku Kepala UPTD Parkir Timur pada pukul 10.29 WIB, menjelaskan bagaimana latar belakang inovasi karcis parkir hologram berhadiah:

“Latar belakang adanya inovasi karcis parkir hologram berhadiah merupakan hasil dari evaluasi inovasi sebelumnya yang berbeda mekanismenya, perbedaan tersebut terletak pada mekanisme pemberian hadiah. Inovasi sebelumnya dilakukan undian setiap satu tahun sekali, sedangkan inovasi karcis parkir

“Seluruh juru parkir yang ada di Kota Surabaya sudah di himbau untuk menggunakan karcis baru yang berhologram, dengan tarif baru sesuai dengan yang tertera pada karcis. Hal ini patut di apresiasi karena adanya terobosan baru dari Dishub Kota.”³

*"Saya gak tau kalo Dinas Perhubungan Kota Surabaya menerapkan sebuah inovasi baru. Saya taunya malah dari sampean kalo ada inovasi karcis parkir hologram berhadiah langsung. Karna saya sendiri tipikal orang yang jarang minta karcis sama juru parki, lah saya saya juga gak tau yang mana parkir resmi dan tidak resmi yang penting saya parkir, kendaraan saya aman."*⁴

Dari hasil wawancara dengan salah satu pengguna jasa parkir di tepi jalan umum dapat dipahami jika masih ada yang belum mengetahui realisasi

⁴ Rendy, *Wawancara*, Surabaya, 15 juli 2016.

“Dishub sudah melakukan sosialisasi baik di tempat parkir yang ada di tepi jalan umum, maupun dengan menyebarkan brosur. Akan tetapi sosialisasi yang dilakukan masih kurang optimal dikarenakan jumlah personil UPTD Parkir sedikit.”⁵

Pemberlakuan karcis parkir hologram berhadiah belum seluruhnya dilaksanakan oleh juru parkir se Kota Surabaya, peneliti mencoba bertanya pada juru parkir ditepi jalan umum daerah blauran pada pukul 09.55 WIB, ditemukan masih ada juru parkir menggunakan karcis lama yang nominal tarif retribusinya masih senilai Rp. 500. Ketika ditanya beliau menjawab:

“Saya sudah lama menjadi tukang juru parkir roda dua, saya sudah mengetahui program barunya Dishub, bahkan saya juga sudah mendapatkan karcis model baru tapi saya masih menggunakan karcis model lama jadi sayang kalau gak dipakai.”⁶

⁶ Jukir, *Wawancara*, Surabaya, 28 Juli 2016.

“Saya tidak tau inovasi terbaru tentang karcis parkir berhadiah, karena setiap kali saya memarkirkan kendaraan bermotor saya tidak jarang saya tidak mendapatkan karcis”⁷.

Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan informan saudara Widodo Kusumo yakni tidak memperdulikan berapa nominal yang harus dibayar untuk sekali parkir, serta informan tidak mengetahui jika terdapat juru parkir yang menyalahgunakan tarif karcis. Bahkan untuk inovasi terbaru Dishub informan benar-benar tidak mengetahui sama sekali. Sedangkan hasil wawancara dengan juru parkir Bapak Yusuf tukang juru parkir roda 4 jalan blauran mengatakan:

“Semenjak karcis baru diberlakukan, saya sudah menggunakannya. Untuk penarikan tarif retribusi ya saya sesuaikan dengan yang ada dikarcis, tapi terkadang ada orang-orang yang memberikan lebih dari Rp. 3000 untuk kendaraan roda empat.”⁸

Dari apa yang telah dipaparkan oleh bapak Yusuf diatas tidak semua tukang juru parkir melakukan praktek tindak kecurangan dilapangan. Karna jika mereka mendapatkan uang lebih bukan berarti dari penarikan retribusi yang lebih mahal, melainkan kepedulian pengguna parkir yang memberikan

uang lebih dari apa yang sudah tertera didalam karcis tersebut. Berikut hasil analisis yang dihubungkan dengan teori:

Tabel 4.1

Hasil Analisis dengan Teori

Realisasi Inovasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Tentang Karcis Parkir Hologram Berhadiah Dinas Perhubungan Kota Surabaya

No	Informan	Data	Teori
1	Tranggono Wahyu (Kepala UPTD Parkir Wilayah Timur	Hasil dari evaluasi inovasi karcis parkir berhadaiah sebelumnya	Teori Kebijakan Publik Anderson, dari salah satu ciri-ciri kebijakan publik dimana setiap kebijakan tidak berdiri sendiri,terpisah dari kebijakan yang lain. Dimana inovasi terbaru berhubungan dengan inovasi kebijakan yang lama.
2	Sutomo (Staf Teknis 3 UPTD Parkir Wilayah Utara)	Banyak ide-ide untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dari sektor parkir	Teori Kebijakan Publik, tentang agenda kebijakan. Proses penyusunan kebijakan di pengaruhi oleh sistem demokrasi dan berbagai opsi pilihan
3	Yuli Astuti (Staf Teknis 3 UPTD Parkir Wilayah Timur)	Dishub telah melakukan sosialisasi baik melalui media online,cetak, terjun langsung di beberapa titik parkir tepi jalan umum.	Teori dan Model Implementasi Kebijakan. Dalam sumberdaya lingkungan ekonomi, sosial dan politik proses perealisasiian karcis parkir hologram berhadaiah telah mencakup seluruh sumberdaya tersebut.

“Saya diberi karcis parkir hologram oleh koordinator lapangan pas pukul 11 malam mbak, itu sekalian ngasih setoran hari ini. Setoran per hari untuk selasa sampai sabtu jumlahnya Rp. 110.000. kalau hari minggu kan banyak toko yang libur jadi setorannya Cuma Rp. 50.000. sedangkan hari senin warung libur jadi gak setor.”¹⁰

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa setoran yang harus diberikan oleh juru parkir ke koordinator lapangan sejumlah Rp.110.000 untuk hari-hari aktif, sedangkan untuk hari minggu dimana banyak toko-toko maupun warung-warung yang ada disekitar jalan Tidar banyak yang tutup maka setoran yang harus diberikan adalah Rp.50.000. Jadi Setoran maupun pemberian karcis yang dilakukan oleh Dishub memang disesuaikan dengan karakteristik wilayah tersebut.

Dari uraian-uraian diatas dapat diketahui apa saja yang menjadi faktor-faktor terlaksananya sebuah inovasi kebijakan baru Dishub. Maka bapak Sutomo selaku staf teknis 3 UPTD Parkir Utara juga menjelaskan apa

[illegible]

saja yang menjadi faktor penghambat dari inovasi Kebijakan baru Dishub
berupa karcis parkir hologram berhadiah:

“Faktor penghambat memang kebanyakan jukir memungut retribusi tidak sesuai dengan ketentuan, itu disebabkan pengawasan kami kurang optimal artinya jumlah Tukang juru parkir dengan jumlah pengawas tidak seimbang, mungkin perlu dilakukan pembenahan sistem. Kita juga sudah mengkaji ada wacana kedepan untuk menetralsir peredaran uang secara langsung di juru parkir, kita sudah ada waktu melakukan kajian-kajian Cuma masih butuh waktu kearah sana karna butuh waktu, tenaga dan modal.”¹¹

Dari apa yang telah dipaparkan oleh bapak Sutomo diatas dapat diketahui bahwa salah satu faktor penghambat berjalannya realisasi karcis parkir hologram adalah dari tukang juru parkir dilapangan yang memungut retribusi tidak sesuai dengan ketentuan. Ditambah lagi jumlah pengawas lapangan tidak seimbang dengan jumlah tukang juru parkir yang ada di titik-titik parkir tepi jalan umum Kota Surabaya. Berikut hasil analisis yang dihubungkan dengan teori:

Tabel 4.2

Hasil Analisis dengan Teori

**Faktor Pendukung dan Penghambat Realisasi Inovasi Kebijakan
Retribusi Pelayanan Parkir Tentang Karcis Parkir Hologram Berhadiah
Dinas Perhubungan Kota Surabaya**

No	Informan	Data	Teori
1	Rahmad Ali Dani (Staf Teknis UPTD Parkir Wilayah Selatan)	Pentingnya peran media dalam proses perealisasi inovasi karcis	Teori Kebijakan Publik dalam konsep pelayanan publik dimana harus ada sarana dan prasarana yang mendukung dalam

¹¹ Sutomo, *Wawancara*, Surabaya, 27 juli 2016.

		parkir	penyelenggaraan inovasi karcis parkir hologram berhadiah.
2	Muhammad Husain (Juru Parkir Kendaraan Roda 2)	Adanya kejelasan setoran yang harus disetor oleh juru parkir kepada koordinator parkir	Teori Kebijakan Publik dalam konsep pelayanan publik bahwa pihak yang terlibat memberikan pelayanan harus profesional, disiplin dan transparan dalam memberikan uang setoran, agar tidak terjadi penyalahgunaan setoran.
3	Sutomo (Staf Teknis 3 UPTD Parkir Wilayah Utara)	Penarikan retribusi yang dilakukan juru parkir tidak sesuai dengan nominal yang tertera pada karcis	Teori dan Model Implementasi Kebijakan, dalam pelaksanaannya tidak semua inovasi dapat berjalan dengan yang diharapkan, terkadang ada oknum tertentu menyalahi aturan yang telah berlaku.

B. Pembahasan dan Analisis

Setelah merangkum data-data yang sudah dipaparkan diatas selanjutnya peneliti akan melakukan pembahasan dan analisis.

Kebijakan menurut Anderson merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Berdasarkan data yang telah ditemukan oleh peneliti, dapat dianalisis diantaranya:

Tahap Pertama, dilakukan identifikasi dan perumusan masalah. Karena dengan dilakukannya perumusan masalah dapat membantu asumsi-asumsi yang tersembunyi, diagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan merancang peluang-peluang inovasi kebijakan baru.¹²

Tahap Kedua, Agenda kebijakan dan partisipasi masyarakat. Agenda kebijakan tidak lain adalah sebuah daftar permasalahan atau isu yang mendapat perhatian serius karena berbagai sebab untuk ditindak lanjuti atau diproses pihak yang berwenang menjadi kebijakan. Apakah kebijakan yang akan dibuat dapat memenuhi keinginan masyarakat atau tidak.¹³

Dinas Perhubungan Surabaya berniatif membuat inovasi kebijakan retribusi pelayanan parkir berupa karcis parkir hologram berhadiah sebagai bentuk apresiasi Dishub terhadap masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya baik melalui forum media center maupun forum pengaduan yang telah disediakan. Sebagai bentuk evaluasi terhadap inovasi kebijakan sebelumnya, yang dikatakan

¹³ Said Zainal Abidin. *Kebijakan Publik*. (Jakarta : Salemba Humanika, 2012), 95.

Tahap Ketiga. Perumusan kebijakan. Perumusan (formulasi) kebijakan merupakan proses kelanjutan dari perumusan masalah yang telah dimasukkan dalam agenda kebijakan, yang bertujuan mengembangkan rencana, metoda, dan konsep-konsep sebagai upaya untuk menghasilkan peraturan yang diusulkan.¹⁴ Pada tahap ini Dinas Perhubungan membuat sebuah inovasi kebijakan retribusi pelayanan parkir berupa karcis parkir hologram berhadiah dengan melihat latar belakang realisasi inovasi sebelumnya berupa karcis parkir undian berhadiah setiap satu tahun sekali.

¹⁴ Ismail Nawawi. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: Putra Media Nusantara ITS, 2009), 123.

Sedangkan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir perlu berkontribusi dalam terlaksananya inovasi kebijakan baru tersebut karna dengan meminta karcis parkir dapat mengurangi angka kebocoran PAD. Inovasi kebijakan karcis parkir hologram berhadiah merupakan salah satu program Dishub sebagai satu solusi sistem pengelolaan perparkiran yang ada.

[illegible]

Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan. Komunikasi yang baik sangat diperlukan dalam hal koordinasi dan kerjasama agar kebijakan berjalan sesuai yang diharapkan baik dari instansi terkait, masyarakat, serta penyedia jasa parkir.

Disposisi Pelaksana. sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana

Kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup

Peneliti menemukan banyak hal, implementasi karcis parkir hologram

[illegible]

yang tercantum pada Perwali Nomor 36 tahun 2015 tentang kenaikan retribusi pelayanan parkir. karna keengganan masyarakat untuk mempermasalahkan nominal yang harus dibayar untuk parkir kendaraannya.

Menurut James Anderson sebuah kebijakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan. Sehingga dapat dipahami orientasi pada tujuan suatu kebijakan sangat berarti.

Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum. Suatu kebijakan berhubungan dengan kebijakan terdahulu dan akan diikuti oleh kebijakan lain.

Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki atau dilakukan pemerintah. Karena kebijakan pada dasarnya adalah pedoman untuk bertindak baik untuk melakukan maupun untuk tidak melakukan sesuatu guna mencapai tujuan, sehingga diperlukan adanya keputusan pengaturan dari pemerintah.

Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan dan menganjurkan. Selain melarang dan menganjurkan, dalam masyarakat juga terdapat kebijakan yang tidak bersifat melakukan dan juga tidak bersifat melarang. Dalam pengambilan suatu keputusan

*Kebijakan harus berdasarkan hukum, sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat untuk mengikutinya*¹⁵.

C. Hasil Realisasi Inovasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya

¹⁵ Zainal Abidin, Said. *Kebijakan Publik*. (Jakarta : Salemba Humanika, 2012), 22-23.

dengan nominal yang tertera pada karcis, adapula juru parkir yang dengan sengaja tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir.

Bahkan masyarakat pengguna jasa parkir tidak semuanya mengetahui inovasi terbaru dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya dikarenakan beberapa hal yakni pengguna jasa parkir terkadang tidak mendapatkan karcis parkir yang menjadi haknya, keengganan masyarakat untuk mengetahui karcis parkir hologram berhadiah Dinas Perhubungan Kota Surabaya, serta keengganan masyarakat untuk mempersoalkan penarikan retribusi yang tidak sesuai dengan yang tertera di karcis. Sedangkan faktor pendukung dari inovasi karcis parkir hologram berhadiah yakni adanya kesadaran dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan parkir yang lebih baik terhadap masyarakat pengguna jasa parkir khususnya di Kota Surabaya.